



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG



PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KOTA PANGKALPINANG**

KATA PENGANTAR

berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ Tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan RKPD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah dengan ini diminta untuk melakukan langkah-langkah percepatan perubahan RKPD Tahun 2025, dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dalam rangka menyinergikan Asta Cita yang merupakan misi Presiden terpilih ke dalam Perubahan RKPD dan Perubahan APBD Tahun 2025 sehingga berimbas kepada percepatan penyusunan perubahan Renja Tahun 2025 yang dalam hal ini salah satu Asta Cita yang di ampu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pangkal Pinang yaitu Asta Cita yang ke empat yaitu Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas dengan Program Prioritas ke delapan yaitu Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi.

Terkait hal tersebut di atas, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pangkalpinang dalam upaya memenuhi pencapaian target dan sasaran kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, sekaligus dalam rangka mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode satu tahun, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pangkalpinang telah menyusun Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 sesuai yang diamanatkan dengan berpedoman pada pagu indikatif yang telah ditetapkan oleh Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026.

Atas tersusunnya Perubahan Rencana Kerja ini, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak atas partisipasi dan kepeduliannya. Semoga dapat bermanfaat khususnya bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pangkalpinang dan Pemerintah Kota Pangkalpinang umumnya.

Pangkalpinang, Mei 2025

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN KOTA PANGKALPINANG,**



Dr.Hj. ETI FAHRIATY, S.Pd.I., M.Pd
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP 19650724 198703 2 002

**LEMBAR PENGESAHAN
RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2025**

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pangkalpinang Tahun 2025 ini telah diverifikasi oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah Kota Pangkalpinang beserta Tim pada tanggal Mei 2025, untuk kesesuaian antara program dan kegiatan yang ada di Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pangkalpinang dengan program dan kegiatan yang ada di Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2025.

Selanjutnya, Perubahan Rencana Kerja (RENJA) ini disahkan dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pangkalpinang.

Disahkan di Pangkalpinang

Pada tanggal, Mei 2025

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN KOTA PANGKALPINANG,**



Dr. Hj. ETI FAHRIATY, S.Pd.I., M.Pd
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP 19650724 198703 2 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Lembar Pengesahan	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
BAB I Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II Evaluasi Rencana Kerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025	
2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan triwulan I Tahun 2025	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pangkalpinang	19
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pangkalpinang	25
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	26
BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.....	32
BAB V Penutup	42
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL / GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Alir Tahapan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja	3
Tabel T-C.29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah dan Pencapaian Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pangkalpinang yang mencacu pada peraturan perundang undangan yang berlaku	13
Tabel T-C.30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pangkalpinang	21
Tabel T-C.31	Reviu terhadap rancangan awal Perubahan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2025	26
Tabel T-C.32	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Kota Pangkalpinang Tahun 2025	31
Tabel T-C.33	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 ..	42

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD) merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) untuk penyesuaian perencanaan tahunan. Disamping Undang-undang di atas perubahan Renja juga di dasarkan adanya perubahan peraturan yang berlaku.

Pada tahun 2025 ini ada sejumlah aturan yang membuat perubahan besar dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah di sebabkan adanya perubahan dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 dan APBD Tahun Anggaran 2025, antara lain:

- a. Inpres Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025;
- b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi TKD menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota TA 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025;
- c. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ Tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam APBD Tahun Anggaran 2025;.
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ulang Tahun 2025;
- e. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ Tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025.

Adanya kebijakan di atas membuat seluruh daerah termasuk Pemerintah Kota Pangkal Pinang harus melakukan efisiensi dengan

melakukan pengurangan, penyesuaian dan perubahan pada belanja yang tidak prioritas dan belanja yang hanya bersifat pendukung, termasuk perlunya dukungan penganggaran untuk pelaksanaan Pilkada Ulang pada tanggal 27 Agustus 2025 yang akan datang. Selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ Tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan RKPD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah dengan ini diminta untuk melakukan langkah-langkah percepatan perubahan RKPD Tahun 2025, dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dalam rangka menyinergikan Asta Cita yang merupakan misi Presiden terpilih ke dalam Perubahan RKPD dan Perubahan APBD Tahun 2025 sehingga berimbas kepada percepatan penyusunan perubahan Renja Tahun 2025 yang dalam hal ini salah satu Asta Cita yang di ampu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pangkal Pinang yaitu Asta Cita yang ke empat yaitu Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas dengan Program Prioritas ke delapan yaitu Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan RENJA PD), adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah yang dilakukan perubahan untuk menyesuaikan program kerja dan target yang ada dalam suatu organisasi dalam tahun berjalan. Perubahan Rencana Kerja (Perubahan RENJA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pangkalpinang mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah karena beberapa hal sebagai berikut :

1. Perubahan RENJA PD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan tujuan, sasaran dan program prioritas Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pangkalpinang

Tahun 2024-2026 sesuai arahan operasional dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) Tahun 2025.

2. Perubahan RENJA merupakan acuan OPD untuk menyesuaikan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS serta perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) tahun 2025.
3. Perubahan RENJA PD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi guna mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja PD pada tahun 2025 yang merupakan tahun pertama pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026.

Mengingat arti strategis dokumen Perubahan RENJA PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Perubahan RENJA PD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, antara lain :

1. Penentuan/penetapan target indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan pada Perubahan Renja Tahun 2025 mengacu pada realisasi/capaian yang telah diperoleh tahun sebelumnya atau mengacu pada hasil pengendalian dan evaluasi tahun berjalan (sampai dengan

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pangkalpinang Tahun 2024, adalah :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Desease* 2019 (Covid-19);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 03 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Di Lingkungan Kota Pangkalpinang (Lembar Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2015 Nomor 03)
 15. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang;
 16. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021 Nomor 50);

17. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan RKPD Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 No. 277).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini adalah sebagai acuan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja program/kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025, dan perencanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2025. Sedangkan tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja ini adalah untuk memasukkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada di Perubahan Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pangkalpinang Tahun 2025, meliputi :

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang dan hubungan antar dokumen, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisannya.

Bab II Evaluasi Rencana Kerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Bab ini memuat kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja perangkat daerah sampai dengan Triwulan I tahun berkenaan.

Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Menjelaskan rencana kerja serta pendanaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pangkalpinang pada tahun 2025.

Bab IV Penutup

Menjelaskan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan triwulan I Tahun 2025

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pangkalpinang tahun 2025 Berdasarkan hasil evaluasi ini dapat diketahui program/kegiatan mana yang tidak memenuhi atau memenuhi dan/atau melebihi persentase pencapaian target kinerja hasil/keluaran yang telah direncanakan.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pangkalpinang sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang, diberi wewenang untuk menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam **Urusan Kearsipan** dan **Urusan Perpustakaan**. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang merupakan urusan wajib bukan pelayanan dasar. Pada Tahun 2025 untuk urusan Kearsipan ada 2 (dua) program dengan 5 (lima) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan, sedangkan untuk urusan Perpustakaan ada 1 (satu) program dengan 2 (dua) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan yang terurai dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kota Pangkalpinang, yaitu:

1. Program Pengelolaan arsip, yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan:
 - a. Pengelolaan arsip dinamis daerah Kabupaten/Kota, yang meliputi 2 sub kegiatan yaitu:
 - 1) Pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis, sub kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk layanan pembenahan arsip yang dilakukan secara manual atau terjun langsung ke lapangan guna mendata dan menata arsip inaktif yang belum dipilah secara benar mulai dari mengambil /menerima arsip-arsip yang masih kacau dari Organisasi

Perangkat Daerah kemudian dipilah dan dipisahkan antara arsip dengan non arsip, kemudian dikelompokkan berdasarkan masing-masing kode klasifikasi kearsipan (mulai dari kode 000–umum sampai dengan kode 900–keuangan), selanjutnya dimasukkan ke dalam map/kertas pembungkus dan dicatat dalam daftar arsip sementara untuk kemudian digabungkan dengan folder yang berisikan arsip yang hampir sama isi informasinya ke dalam boks arsip yang telah diberi nomor urut dan label klasifikasi. Boks-boks arsip ini kemudian akan disimpan dan ditata dengan rapi sesuai kategori dan urutannya pada rak arsip maupun *roll o’pack* serta diberi kapur barus untuk menghindarkannya dari faktor perusak arsip seperti rayap dan kutu buku (*silverfish*). Untuk realisasi anggaran kegiatan ini sampai Triwulan I sebesar Rp. Rp 4.378.616,00 atau mencapai 7,55% dari total pagu Rp. Rp 57.974.596,00. Hasil/output dari kegiatan ini adalah :

1. Terpilah dan terdatanya arsip daerah yang kacau.
 2. Terkelolanya arsip dinamis dan arsip statis di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.
 3. Terdata dan tertatanya arsip inaktif di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.
 4. Tersedianya daftar arsip.
 5. Tersedianya arsip foto berupa foto dokumentasi kegiatan apabila kegiatan ini di laksanakan.
- 2) Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota, sub kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pelaksanaan audit kearsipan baik eksternal maupun internal oleh Tim Pengawas Kearsipan secara efektif dan efisien dengan tujuan terwujudnya Laporan Pengawasan Kearsipan baik Eksternal maupun Internal secara lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk realisasi anggaran kegiatan ini sampai Triwulan I sebesar Rp. 24.683.080,00 atau mencapai 43,58% dari total pagu Rp.56.543.392,00
- b. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota yang meliputi 1 sub kegiatan yaitu Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis, sub

kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk upaya untuk mendapatkan atau menambah khazanah atau koleksi arsip yang sebelumnya dimiliki oleh pencipta arsip (creating agency) selaku 'donor arsip' kepada pihak yang bermaksud menambah khazanah arsip selaku pihak lain yang menerima donor. Sampai triwulan 1 realisasi anggaran sub kegiatan ini masih Rp. 0,00 karena sub kegiatan ini dilakukan pada Semester I oleh Bidang Pengelolaan Kearsipan.

- c. Pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat kabupaten/kota yang meliputi 2 sub kegiatan yaitu:
- 1) Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN
 - 2) Pemberdayaan Kapasitas Unit kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/kota

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan informasi bagi masyarakat terkait arsip dan menciptakan arsiparis dan/atau pengelola arsip yang ada di unit-unit kearsipan Organisasi Perangkat Daerah yang telah ditunjuk untuk mendapat bimbingan tentang pengelolaan arsip dinamis (arsip aktif, arsip inaktif, dan arsip terjaga) secara baik dan benar berdasarkan kaidah dan peraturan kearsipan yang berlaku.

Tujuan dari kegiatan ini adalah :

1. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kearsipan khususnya pengelola arsip dan arsiparis tentang bagaimana mengelola arsip dinamis (arsip aktif, arsip inaktif, dan arsip terjaga) serta menyamakan persepsi tentang bagaimana mengelola kearsipan di unit pencipta arsip (OPD) yang telah dipilih di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.
2. Memberikan materi tentang kearsipan, yang berisi bagaimana cara pengelolaan arsip dinamis, arsip vital, arsip terjaga dan arsip statis yang baik dan benar sesuai dengan kaidah dan peraturan yang berlaku, serta memberikan dasar hukum, tanggungjawab, fungsi dan tugas pokok sebagai pengelolaan kearsipan.
3. Pembinaan secara langsung dengan cara praktek langsung pengelolaan arsip dinamis di tempat, proses dan penggunaan komponen kearsipan serta tata

cara pengolahan dan penyimpanan arsip yang memenuhi kriteria yang ditetapkan sesuai standar kearsipan nasional.

4. Melaksanakan konsultasi dan diskusi tentang permasalahan yang dihadapi oleh pengelola arsip di Unit Pencipta Arsip, serta memberikan solusi secara bersama.
5. Menyediakan sarana informasi terkait kearsipan melalui aplikasi srikandi dan SIKN

Kegiatan ini terealisasi sebesar Rp. 0,00 dari anggaran sebesar Rp. 158.085.000

2. Program pembinaan Perpustakaan, dengan 2 (dua) kegiatan dan 3(tiga) sub kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota, yang menaungi 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:

- 1) Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan (SNP), bentuk dari kegiatan ini adalah melakukan pembinaan pada perpustakaan sekolah-sekolah sesuai standar yang telah ditetapkan. Anggaran Sub kegiatan ini sudah terealisasi sebesar Rp.5.378.616,00 atau 5,52% dengan jumlah pagu sebesar Rp.97.381.696,00.
- 2) Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota Bentuk dari sub kegiatan ini adalah melakukan pengembangan layanan perpustakaan. Perpustakaan Kota Pangkalpinang adalah salah satu lembaga pendidikan non formal yang dengan segala keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)nya, berusaha keras secara bertahap menjalankan fungsinya sebagai pusat informasi sumber ilmu pengetahuan dan teknologi, rekreasi serta pelestarian khasanah budaya bangsa merupakan wadah bagi pelajar/mahasiswa maupun masyarakat yang memerlukannya. Melalui kegiatan ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memberikan pelayanan perpustakaan, sirkulasi peminjaman dan pengembalian buku, membuat kartu anggota, perawatan bahan bacaan dan statistik. Disamping itu Dinas perpustakaan dan kearsipan Kota Pangkalpinang melakukan layanan perpustakaan kepada masyarakat dengan menggunakan mobil perpustakaan keliling yang

merupakan sarana sekaligus media untuk mendekatkan perpustakaan ke masyarakat. Perpustakaan keliling ini juga merupakan sarana untuk mengembangkan minat dan budaya baca masyarakat. Sasaran kegiatan mobil perpustakaan keliling ini adalah kunjungan masyarakat ke sekolah-sekolah, kampus, taman pendidikan masyarakat, Lembaga Permayarakatan, pusat keramaian. Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini yaitu untuk mendekatkan informasi kepada masyarakat yang pada akhirnya akan memperluas wawasan masyarakat Kota Pangkalpinang.

3) Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka

Bentuk kegiatan pemeliharaan berupa perbaikan buku rusak dan penyiangan buku-buku yang rusak. Sedangkan pengolahan bahan pustaka berupa melaksanakan inventarisasi buku - buku, melaksanakan klasifikasi buku berdasarkan subyek dengan klas 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 dan 900. Katalogisasi berdasarkan AACR2 dengan menentukan tajuk entri utama terlebih dahulu. Kemudian memberi kelengkapan buku seperti kantong buku, kartu buku, *data due* dan label bercode. Hal ini diharapkan agar pemustaka dapat menemukan bahan pustaka secara cepat dan mudah. Selain itu juga untuk menata dan memelihara bahan pustaka dari serangga atau karena cuaca (kelembaban) sehingga kondisi dapat lebih berdaya guna dengan waktu yang lama.

b. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatannya yaitu Pengembangan literasi berbasis inklusi sosial.

Sub kegiatan ini merupakan kegiatan yang di danai oleh dana DAK sebesar Rp. 554.000.000,00. Bentuk sub kegiatan ini adalah pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan dengan membentuk kehidupan sosial yang lebih berkualitas. Sebab, pada masyarakat inklusif, adanya kerja sama dan kolaborasi menjadi nilai yang didorong. Banyak kegiatan yang dilaksanakan pada kegiatan ini di antaranya kegiatan Gerakan pembudayaan membaca yang meliputi: Bimtek membaca nyaring untuk guru, pustakawan, pengiat literasi, orang tua, Lomba bertutur tingkat SD,

Bimtek literasi informasi untuk pustakawan, guru, dan pengiat literasi, Kegiatan Pengembangan konten literasi berbasis kearifan lokal yang meliputi Bimtek kepenulisan berbasis konten budaya lokal, Lomba video konten literasi Kegiatan Pekan literasi daerah, yang meliputi Lomba perpustakaan desa terbaik, Festival literasi { pameran produk literasi, gelar wicara literasi, penampilan karya literasi}, Kegiatan Pendataan perpustakaan yang meliputi Pendataan Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Khusus dan Perpustakaan Kelurahan.

Realisasi kinerja yang telah di capai dalam Perubahan Renja ini dapat di lihat pada Laporan realisasi Renja Triwulan 1 pada tabel berikut :

Tabel 2.1 (T.C 29)
Rekapitulasi hasil pelaksanaan renja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 DAN
capaian renstra dinas perpustakaan dan kearsipan kota pangkalpinang tahun 2025

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2025								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							I		II		III		IV						
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	-	022301	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	-	5.106.005.374		1.286.917.598		0		0		0	0	1.286.917.598		25,20	BIDANG SEKRETARIAT
				Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	90		90							90			100		BIDANG SEKRETARIAT
2		022301202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat sesuai SAP (Dengan Satuan:%)	100	4.273.063.422	100	1.233.752.822		0		0		0	100	1.233.752.822	100	28,87	SUB KORDINATOR PEP DAN KEUANGAN
3		022301202001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	35	4.273.063.422	35	1.233.752.822							35	1.233.752.822	100	28,87	SUB KORDINATOR PEP DAN KEUANGAN
4		022301206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (Dengan Satuan:%)	100	205.024.100	100	0		0		0		0	100	0	100	0,00	SUB KORDINATOR PEP DAN KEUANGAN
5		022301206001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	5.693.600	1								1	0	100	0,00	SUB KORDINATOR PEP DAN KEUANGAN
7		022301206003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	2.080.000	1								1	0	100	0,00	SUB KORDINATOR PEP DAN KEUANGAN
8		022301206004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	33.089.000	1								1	0	100	0,00	SUB KORDINATOR PEP DAN KEUANGAN
9		022301206005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	14.161.500	1								1	0	100	0,00	SUB KORDINATOR PEP DAN KEUANGAN
10		022301206009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	10	150.000.000	10								10	0	100	0,00	SUB KORDINATOR PEP DAN KEUANGAN
13		022301208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:%)	100	479.449.460	100	48.786.160		0		0		0	100	48.786.160	100	10,18	SUB KORDINATOR PEP DAN KEUANGAN

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

14		022301208002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	4	192.000.000	4							4	0	100	0,00	SUB KORDINATOR PEP DAN KEUANGAN	
15		022301208003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	4	37.750.000	4							4	0	100	0,00	SUB KORDINATOR PEP DAN KEUANGAN	
16		022301208004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	4	249.699.460	4	48.786.160						4	48.786.160	100	19,54	SUB KORDINATOR PEP DAN KEUANGAN	
17		022301209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	100	148.468.392	100	4.378.616	0		0		0	100	4.378.616	100	2,95	SUB KORDINATOR PEP DAN KEUANGAN	
18		022301209001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	1	61.496.696	1							1	0	100	0,00	SUB KORDINATOR PEP DAN KEUANGAN	
19		022301209002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	8	65.700.000	8							8	0	100	0,00	SUB KORDINATOR PEP DAN KEUANGAN	
20		022301209009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	1	21.271.696	1	4.378.616						1	4.378.616	100	20,58	SUB KORDINATOR PEP DAN KEUANGAN	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																100,000	25,20		
PREDIKAT KINERJA																			
21	-	022302	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase pustakawan/pengelola perpustakaan yang bersertifikat (Dengan Satuan:%)	3	863.623.568	3	37.778.928	0		0		0	3	37.778.928	100	4,37	B I D A N G PERPUSTAKAAN	
				Persentase koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah dan perpustakaan binaan lainnya (Dengan Satuan:%)	6		6						6			100		B I D A N G PERPUSTAKAAN	
22		022302201	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP) (Dengan Satuan:Perpustakaan)	25	356.150.568	25	37.778.928	0		0		0	25	37.778.928	100	10,61	SUB KORDINATOR D E P O S I T , P E N G E M B A N G A N KOLEKSI, PENGOLAHAN DAN PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN	
23		022302201004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Dengan Satuan:Perpustakaan)	60	97.381.696	15	5.378.616						15	5.378.616	25	5,52	SUB KORDINATOR D E P O S I T , P E N G E M B A N G A N KOLEKSI, PENGOLAHAN DAN PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN	
			Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi (Dengan Satuan:layanan)	4	174.497.176	1	27.521.696						1	27.521.696	25	15,77		

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

24		022302201006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Didit n g k a t k a n Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	2	0												SUB KORDINATOR D E P O S I T , P E N G E M B A N G A N KOLEKSI, PENGOLAHAN DAN PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN
26		022302201009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	J u m l a h B a h a n Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan (Dengan Satuan:Eksemplar)	2.000	84.271.696	50	4.878.616				50	4.878.616	3	5,79	SUB KORDINATOR D E P O S I T , P E N G E M B A N G A N KOLEKSI, PENGOLAHAN DAN PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN		
27		022302202	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	p e r s e n t a s e perpustakaan yang berbas Inklusi Sosial (Dengan Satuan:%)	29	507.473.000	5	0	0	0	0	5	0	17	0,00	SUB KORDINATOR D E P O S I T , P E N G E M B A N G A N KOLEKSI, PENGOLAHAN DAN PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN		
28		022302202004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (D e n g a n Satuan:Perpustakaan)	2	507.473.000	2				2	0	100	0,00	SUB KORDINATOR D E P O S I T , P E N G E M B A N G A N KOLEKSI, PENGOLAHAN DAN PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)														100,00	4,37			
PREDIKAT KINERJA																		
29	-	022402	P R O G R A M PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat D a e r a h y a n g m e n e r a p k a n Pengelolaan arsip secara baku (Dengan Satuan:%)	93	329.327.988	15	14.635.848	0	0	0	15	14.635.848	16	4,44	B I D A N G PENGELOLAAN ARSIP		
				Persentase Arsiparis yang bersertifikat (Dengan Satuan:%)	53		15					15		28		BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEARSIPAN		
				Persentase OPD yang memperoleh nilai pengawasan arsip "baik (Dengan Satuan:%)	100		15					15		15		BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEARSIPAN		
30		022402201	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	berkas arsip dinamis daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:berkas)	2.000	137.217.988	30	14.635.848	0	0	0	30	14.635.848	2	10,67	SUB KORDINATOR PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS		
32		022402201002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan (Dengan Satuan:Berkas)	1.500	57.974.596	30	4.378.616				30	4.378.616	2	7,55	SUB KORDINATOR L A Y A N A N D A N PEMANFAATAN ARSIP STATIS		
33		022402201003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	4	79.243.392	1	10.257.232				1	10.257.232	25	12,94	SUB KORDINATOR L A Y A N A N D A N PEMANFAATAN ARSIP STATIS		
34		022402202	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	objek Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:objek)	4	34.025.000	4	0	0	0	0	4	0	100	0,00	SUB KOORDINATOR AKUISISI, PENGELOLAAN DAN PRESERVASI ARSIP STATIS		
35		022402202002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis (Dengan Satuan:Arsip)	52	34.025.000	5					5	0	10	0,00	SUB KOORDINATOR AKUISISI, PENGELOLAAN DAN PRESERVASI ARSIP STATIS		
30			Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:perangkat daerah)	34	158.085.000	5	0	0	0	0	5	0	15	0,00	SUB KORDINATOR PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS		

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

31			Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN (Dengan Satuan:pengguna)	30	54.000.000	2							2	0	7	0,00	SUB KORDINATOR L A Y A N A N D A N P E M A N F A A T A N A R S I P S T A T I S
32			Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	1	104.085.000	1							1	0	100	0,00	SUB KORDINATOR L A Y A N A N D A N P E M A N F A A T A N A R S I P S T A T I S
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																19,810	4,44	
PREDIKAT KINERJA																		
36	-	022403	P R O G R A M P E R L I N D U N G A N D A N P E N Y E L A M A T A N A R S I P	Persentase berkas arsip yang dilindungi dan diselamatkan sesuai dengan ketentuan (Dengan Satuan:%)	80	51.472.000	10	0	0	0	0	0	0	10	0	13	0,00	B I D A N G P E N G E L O L A A N A R S I P
37		022403201	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah arsip yang dimusnahkan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun (Dengan Satuan:berkas)	400	1.472.000		0		0		0		0	0	0	0,00	SUB KORDINATOR L A Y A N A N D A N P E M A N F A A T A N A R S I P S T A T I S
38		022403201001	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun (Dengan Satuan:Arsip)	600	1.472.000								0	0	0	0,00	SUB KORDINATOR L A Y A N A N D A N P E M A N F A A T A N A R S I P S T A T I S
39		022403205	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Jumlah objek Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang (Dengan Satuan:objek)	4	50.000.000		0		0		0		0	0	0	0,00	SUB KORDINATOR L A Y A N A N D A N P E M A N F A A T A N A R S I P S T A T I S
40		022403205001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan (Dengan Satuan:Arsip)	25	50.000.000								0	0	0	0,00	SUB KORDINATOR L A Y A N A N D A N P E M A N F A A T A N A R S I P S T A T I S
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																12,500	0,00	
PREDIKAT KINERJA																		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SEMUA PROGRAM (%)																58,078	8,51	
PREDIKAT KINERJA																		

Sementara itu apabila kita telaah lebih jauh Rencana Strategis (Renstra) Perpustakaan Nasional RI 2025-2029 berfokus pada tiga program prioritas, yaitu:

1. penguatan budaya membaca dan literasi;

Perpusnas akan terus mendorong peningkatan literasi melalui berbagai program, termasuk pengembangan koleksi, penyediaan ruang baca yang nyaman, dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk menciptakan ekosistem literasi yang kuat.

2. pengarusutamaan naskah Nusantara;

Perpusnas akan fokus pada pelestarian dan pemanfaatan naskah kuno Nusantara, baik melalui digitalisasi, publikasi, maupun penyediaan akses bagi peneliti dan masyarakat

3. standardisasi dan akreditasi perpustakaan.

Perpusnas akan terus mengembangkan standar dan sistem akreditasi perpustakaan untuk memastikan kualitas pelayanan dan pengelolaan perpustakaan di seluruh Indonesia

Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas perpustakaan dan peranannya dalam pembangunan literasi di Indonesia.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pangkalpinang

Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah berkewajiban untuk menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah, menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan, dan menyelenggarakan serta mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasar kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah di wilayahnya. Sementara Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyebutkan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara/ pemerintahan daerah, menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah, menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menjamin keselamatan dan keamanan arsip

sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pangkalpinang merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang Kepala Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang setingkat Eselon II yang memiliki wewenang penyelenggaraan sebagian urusan wajib pemerintahan daerah dengan tugas pokok dan fungsi dititikberatkan pada urusan Perpustakaan dan urusan Kearsipan. Dalam menjalankan tugas dan fungsi kedua urusan wajib pemerintahan ini, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pangkalpinang melaksanakan program kegiatan yang relevan serta bersinergi dengan arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dirumuskan dalam RPJPD maupun RPD Kota Pangkalpinang serta tidak terpisahkan dan atau menyimpang dari tujuan dan sasaran dalam memberikan pelayanan aparatur kepada pemerintah itu sendiri secara kelembagaan dan pelayanan publik kepada masyarakat sebagai stakeholdernya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa pembagian urusan bidang perpustakaan dalam Pemerintah Daerah yaitu Pembinaan perpustakaan, dengan lingkup;

- Pengelolaan perpustakaan tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
- Pembudayaan gemar membaca tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Sementara jumlah perpustakaan di Kota Pangkalpinang pada Tahun 2024 bertambah menjadi sebanyak 122 perpustakaan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pada Pasal 15 Ayat (4) huruf q dan r, disebutkan bahwa urusan Perpustakaan dan Kearsipan merupakan salah satu urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar pemerintahan yang harus masuk dalam program prioritas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Di dalam RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2024–2026, kedua urusan ini sudah masuk baik dalam perencanaan maupun pelaporan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan dalam RKPD dan APBD Kota Pangkalpinang tahun berkenaan program dan kegiatan urusan Kearsipan dan Perpustakaan secara rutin dianggarkan dan dilaksanakan. Atas perencanaan dan pelaksanaan seluruh program dan kegiatan tersebut untuk memenuhi ketentuan yang berlaku harus dilakukan analisis terhadap pencapaian

kinerja hasil dan keluaran dari masing-masing program dan kegiatan yang didasarkan pada tolak ukur/indikator kinerja kuncinya.

Sebagai salah satu lembaga teknis pusat layanan informasi serta belajar masyarakat di Kota Pangkalpinang, basis layanannya lebih dititikberatkan pada layanan publik yang ditujukan untuk menyediakan layanan informasi Kearsipan dan Kepustakaan yang terbuka dan representatif bagi masyarakat Kota Pangkalpinang karena perpustakaan merupakan wahana belajar dalam rangka mengembangkan potensi masyarakat yang berilmu, kreatif dan mandiri sementara arsip merupakan identitas dan jati diri bangsa.

Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 mempunyai 1 (satu) Program urusan Perpustakaan, 2 (dua) program urusan Kearsipan adalah sebagai berikut :

1. Program pengelolaan arsip, yang meliputi kegiatan–kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengelolaan arsip dinamis daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan adalah:
 - 1). Penciptaan dan penggunaan arsip dinamis
 - 2). Pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis;
 - 3). Pengawasan arsip dinamis kewenangan Kabupaten/Kota.
- b. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan adalah:
 - 1). Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis
- c. Pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan adalah Pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah Kabupaten/Kota.
 - 1). Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN
 - 2). Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota

2. Program perlindungan dan penyelamatan arsip, yang meliputi kegiatannya adalah :

- a. Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun dengan sub kegiatan yaitu

Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun.

- b. Pencarian arsip statis Kabupaten/Kota yang dinyatakan hilang, dengan sub kegiatan yaitu Penilaian dan penetapan arsip statis yang dinyatakan hilang.

3. Program pembinaan perpustakaan, yang meliputi kegiatannya yaitu :

- a. Pengelolaan perpustakaan daerah tingkat Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan yaitu:
 - 1). Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
 - 2). Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
 - 3). Pengembangan layanan perpustakaan rujukan tingkat Kabupaten/Kota;
 - 4). Pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka.

Sedangkan kegiatan layanan kepada para pemangku kepentingan khususnya masyarakat Kota Pangkalpinang yang disediakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pangkalpinang berupa :

- 1) layanan pengolahan dan penyajian arsip inaktif,
- 2) layanan peminjaman bahan bacaan,
- 3) layanan membaca di tempat
- 4) layanan bahan referensi baik arsip statis maupun bahan pustaka,
- 5) layanan bahan rujukan,
- 6) layanan sirkulasi,
- 7) layanan perpustakaan keliling, dan
- 8) layanan keanggotaan perpustakaan.

Memenuhi ketentuan Peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 18 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka berikut ini kami sajikan analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pangkalpinang yang digambarkan dalam bentuk tabel di bawah ini :

Tabel T-C.30

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pangkalpinang
Tahun 2019-2023**

NO	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Persentase kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan.	---	---	100	100				100	100				
2.	Persentase arsip statis dan dinamis yang dikelola secara baku	---	---	4,9	5,0				6,33	8,00				
3.	Tingkat pertumbuhan pengunjung perpustakaan	---	---	0,59	0,62				0,46	-0,70				
4.	Rasio perbandingan judul buku terhadap koleksi buku yang tersedia di perpustakaan	---	---	1 : 2	1 : 2				1,06 : 2	1,06 : 2				
5.	Persentase pustakawan dan tenaga pengelola perpustakaan yang memiliki kompetensi	---	---	16	16				30	30				
6.	Persentase OPD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	---	---			5,2	5,3	5,4			5,0	8,0	6,0	
7.	Jumlah kunjungan pemustaka	---	---			50.000	52.500	55.000			19.573	148.460	249.432	

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kota Pangkalpinang Tahun 2024**

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target	Realisasi
				Tahun 2024	Tahun 2024
1	2	3	4	7	8
1.	Persentase pertumbuhan kunjungan masyarakat ke perpustakaan pertahun	---	---	10	45,11
2..	Persentase ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah, dan pertanggungjawaban nasional	---	---	55	99,16

Dari uraian indikator kinerja dalam kolom indikator pada tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa pengukuran kinerja tersebut merupakan indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Tahun 2024-2026 dan RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. Kemudian indikator kinerja tersebut dibuat berdasarkan pencapaian sasaran kinerja dari setiap indikator sasaran layanan bidang Kearsipan dan Perpustakaan yang bisa diukur seperti persentase arsip, tingkat pertumbuhan pengunjung, maupun rasio perbandingan, dan lain sebagainya yang dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pangkalpinang sebagai lembaga teknis penyedia layanan publik bidang kearsipan dan perpustakaan.

Ketujuh indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Tahun 2024-2026 ini merupakan bagian dari Indikator Kinerja Kunci (IKK) baik untuk urusan Kearsipan maupun untuk urusan Perpustakaan, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun;
- 2) Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah;
- 3) Rasio perpustakaan persatuan penduduk;
- 4) Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/ tahun;
- 5) Jumlah koleksi judul buku perpustakaan;
- 6) Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat;

- 7) Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku;

Berdasarkan realisasi pencapaian indikator sasaran diatas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2024 capaian realisasi mencapai target kinerja yang ditetapkan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pangkalpinang

Permasalahan pembangunan adalah penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari Bidang-Bidang per urusan dalam Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pangkalpinang.

Identifikasi permasalahan pada perangkat daerah merupakan salah satu input bagi perumusan tujuan dan sasaran yang bersifat prioritas sesuai *platform* Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Dari bab II yang telah di paparkan terdahulu terdapat capaian kinerja perangkat daerah yang dapat kita telaah dari capaian kinerja tersebut, permasalahan-permasalahan apa yang menyebabkan terkendalanya dalam mencapai target kinerja yang telah di tetapkan.

Permasalahan-permasalahan pembangunan daerah yang dihadapi pada saat ini dan diperkirakan dihadapi juga pada masa yang akan datang oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut :

- a. Masih kurangnya SDM yang berkompeten dalam bidangnya, yaitu dibidang kearsipan maupun bidang perpustakaan baik dari kualitas maupun kuantitas.
- b. Belum adanya sarana dan prasarana penunjang layanan perpustakaan untuk pengunjung berkebutuhan khusus
- c. Belum tersedianya ruang penyimpanan arsip yang sesuai standar karena belum adanya Depo Arsip

- d. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang kearsipan
- e. Masih kurangnya koleksi arsip personal file yang bisa dijadikan bahan referensi dan/atau bahan pendidikan
- f. Rasio perpustakaan persatuan penduduk masih kurang.

Isu strategis yang perlu ditangani dalam pelaksanaan RENSTRA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pangkalpinang sebagai berikut :diambil dari permasalahan, di kerucutkan lagi

- 1. Masih kurangnya SDM yang berkompeten dalam bidangnya, yaitu dibidang kearsipan maupun bidang perpustakaan baik dari kualitas maupun kuantitas.
- 2. Belum adanya sarana dan prasarana penunjang layanan perpustakaan untuk pengunjung berkebutuhan khusus.
- 3. Belum tersedianya sarana dan prasarana penunjang kearsipan serta ruang penyimpanan arsip yang sesuai standar karena belum adanya Depo Arsip.
- 4. Masih kurangnya koleksi arsip personal file yang bisa dijadikan bahan referensi dan/atau bahan pendidikan.
- 5. Rasio perpustakaan persatuan penduduk masih kurang

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa penyusunan perubahan Rencana Kerja harus mengacu pada Perubahan RENSTRA Perangkat Daerah. Hal ini penting untuk menjaga kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang harus disusun. Kemudian perlu dilakukan sinkronisasi dengan rencana program prioritas pada rancangan awal Perubahan RKPD Kota Pangkalpinang, untuk dilakukan review agar diperoleh kesesuaian atau relevansinya.

Tabel T-C.31
Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan Renja Kota Pangkalpinang
Tahun 2025

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025 (N)					Catatan Penting	Hasil analisis kebutuhan		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					Rp 6.350.428.930	APBD				Rp 6.323.325.375
	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan					Rp 5.969.628.942	APBD				Rp 6.039.446.287
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	OPD	75,5	Nilai	Rp 5.106.005.374	APBD		75,5	Nilai	Rp 5.237.499.719
		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	OPD	85	persen				85	persen	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu	OPD	100	%	Rp -	APBD		100	%	Rp -
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	OPD	3	dokumen	Rp -	APBD		3	dokumen	Rp -
02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	OPD	2	laporan	Rp -	APBD		2	laporan	Rp -
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat sesuai SAP	OPD	100	%	Rp 4.273.063.422	APBD		100	%	Rp 4.440.381.767
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	OPD	35	orang/bulan	Rp 4.273.063.422	APBD		35	orang/bulan	Rp 4.440.381.767
02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	OPD	3	laporan	Rp -	APBD		3	laporan	Rp -

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	OPD	3	laporan	Rp -	APBD		3	laporan	Rp -
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN	OPD	100	%	Rp -			100	%	Rp -
01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	OPD	1	paket	Rp -	APBD		1	paket	Rp -
02	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	OPD	4	orang	Rp -	APBD		4	orang	Rp -
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	OPD	100	%	Rp 205.024.100			100	%	Rp 170.982.100
01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	OPD	1	paket	Rp 5.693.600	APBD		1	paket	2.853.100,00
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	OPD	1	paket	Rp -	APBD		1	paket	Rp -
03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	OPD	2	paket	Rp 2.080.000	APBD		2	paket	2.080.000,00
04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	OPD	1	paket	Rp 33.089.000	APBD		1	paket	26.964.000,00
05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	OPD	1	paket	Rp 14.161.500	APBD		1	paket	9.085.000,00
06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	OPD	8	laporan	Rp 150.000.000	APBD		8	laporan	130.000.000,00
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik perangkat daerah	OPD	100	%	Rp -	APBD		100	%	Rp -
01	Pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	OPD	0	unit	Rp -	APBD		1	unit	Rp -
02	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	OPD	1	unit	Rp -	APBD		1	unit	Rp -
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	OPD	100	%	Rp 479.449.460	APBD		100	%	Rp 477.667.460
01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	OPD	4	laporan	Rp 192.000.000			4	laporan	192.000.000,00

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

02	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	OPD	4	laporan	Rp	37.750.000			4	laporan	37.750.000,00
03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	OPD	4	laporan	Rp	249.699.460	APBD		4	laporan	247.917.460,00
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik	OPD	100	%	Rp	148.468.392	APBD		100	%	Rp 148.468.392
01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	OPD	1	unit	Rp	61.496.696	APBD		1	unit	61.496.696,00
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	OPD	8	unit	Rp	65.700.000	APBD		8	unit	65.700.000,00
03	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	OPD	1	unit	Rp	21.271.696	APBD		1	unit	21.271.696,00
II	Program pembinaan perpustakaan	Persentase koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah dan perpustakaan binaan lainnya	OPD	5	%	Rp	863.623.568	APBD		5	%	Rp 801.946.568
		Persentase perpustakaan sekolah yang mengikuti dan memahami tentang perpustakaan yang memenuhi standar pelayanan		2	%			APBD		2	%	
		Persentase pustakawan/pengelola perpustakaan yang bersertifikat		3	%			APBD		3	%	
I	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP)	OPD	21	Perpustakaan	Rp	356.150.568	APBD		21	Perpustakaan	Rp 294.473.568
01	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	jumlah perpustakaan pada satuan pendidikan dasar dan yang dilakukan pembinaan dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	OPD	50	perpustakaan	Rp	97.381.696	APBD		50	perpustakaan	97.381.696,00
02	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kab/kota	OPD	2	Orang	Rp	-	APBD		2	Orang	Rp -

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

03	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan rujukan yang dikembangkan tingkat kabupaten/Kota melalui peningkatan koleksi	OPD	4	layanan	Rp	174.497.176	APBD		4	layanan	172.820.176,00
04	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah bahan perpustakaan yang dilakukan pengelolaan dan pengembangan untuk mewujudkan keberagaman koleksi perpustakaan	OPD	1650	eksemplar	Rp	84.271.696	APBD		1650	eksemplar	24.271.696,00
2	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase perpustakaan yang berbasis inklusi sosial	OPD	29	%	Rp	507.473.000			29	%	Rp 507.473.000
01	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	OPD	2	perpustakaan	Rp	507.473.000	APBD		2	perpustakaan	507.473.000,00
URUSAN KEARSIPAN						Rp	380.799.988					Rp 283.879.088
III	Program pengelolaan arsip	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	OPD	91	%	Rp	329.327.988	APBD		91	%	Rp 263.007.088
		Persentase OPD yang memperoleh nilai pengawasan arsip "baik"	OPD	100	%			APBD		100	%	
		Persentase Arsiparis yang bersertifikat	OPD	40	%			APBD		40	%	
1	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	berkas arsip dinamis daerah Kabupaten/Kota	OPD	1500	berkas	Rp	171.242.988	APBD		1500	berkas	Rp 134.922.088
		jumlah laporan audit kearsipan terhadap pengelolaan arsip dinamis daerah Kabupaten/Kota	OPD	4	laporan audit	Rp	137.217.988	APBD		4	laporan audit	Rp 120.752.088
01	Penciptaan dan penggunaan arsip dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	OPD	1020	berkas	Rp	-	APBD		1020	berkas	Rp -
02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	OPD	1500	berkas	Rp	57.974.596			1500	berkas	50.098.696,00
03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	OPD	4	laporan	Rp	79.243.392	APBD		4	laporan	70.653.392,00
2	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	objek Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	OPD	3	objek	Rp	34.025.000	APBD		3	objek	Rp 14.170.000
01	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	jumlah arsip statis yang dilakukan akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis	OPD	50	arsip	Rp	34.025.000	APBD		50	arsip	14.170.000,00
3	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	OPD	34	Perangkat Daerah	Rp	158.085.000	APBD		34	Perangkat Daerah	Rp 128.085.000

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	OPD	20	pengguna	Rp	54.000.000			20	pengguna	54.000.000.00	
02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota	Jumlah laporan hasil pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah Kabupaten/Kota	OPD	1	laporan	Rp	104.085.000			1	laporan	74.085.000.00	
IV	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase berkas arsip yang dilindungi dan diselamatkan sesuai dengan ketentuan	OPD	80	%	Rp	51.472.000	APBD		80	%	Rp	20.872.000
I	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	jumlah arsip yang dimusnahkan Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	OPD	300	berkas	Rp	1.472.000			300	berkas	Rp	1.472.000
01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	jumlah arsip yang dilakukan penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun	OPD	500	arsip	Rp	1.472.000	APBD		500	arsip	1.472.000.00	
2	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	jumlah objek Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	OPD	3	objek	Rp	50.000.000			3	objek	Rp	19.400.000
01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	OPD	20	arsip	Rp	50.000.000			20	arsip	19.400.000.00	
						Rp	6.350.428.930					Rp	6.323.325.375

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pangkalpinang Tahun 2023 merupakan dokumen perubahan perencanaan pembangunan tahun 2023 sebagai acuan bagi perangkat daerah yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif. Bagi perangkat daerah sebagai pelaksana program, Perubahan Renja Tahun 2023 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kerangka anggaran dalam APBD Perubahan Tahun 2023 yang dalam pelaksanaannya memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran. Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program pembangunan yang ditetapkan dalam Perubahan Renja Tahun 2023 dan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023, diharapkan dana yang tersedia benar-benar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas. Disamping itu perangkat daerah juga membuat rencana aksi dalam upaya pelaksanaan program dan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan Perubahan Renja Tahun 2023 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar bidang dalam OPD, OPD dengan perangkat daerah lainnya, maupun OPD dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjangkaran aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip *safe guarding* yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Untuk jelasnya rencana kerja dan pendanaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dapat kita lihat pada tabel TC 33 berikut:

Tabel T-C.33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 PERUBAHAN

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	Bertambah/Berkura ng (10-12)	LOKAS I	SUMBER DANA	TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SESUDA H	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			6.323.325.375,00	321.411.329,00				5.008.127.901,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			6.323.325.375,00	321.411.329,00				5.008.127.901,00	
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			6.039.446.287,00	332.582.141,00				4.878.127.901,00	
1,	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	90 - Nilai Nilai	5.237.499.719,00	-934.736.245,00				4.622.127.901,00	
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu	100 %	0,00	0,00				6.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

	2.23.01.2.01.00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	2 Dokumen	0,00	0,00	Kota Pangkal Pinang,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.00 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	2 Laporan	0,00	0,00	Kota Pangkal Pinang,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat sesuai SAP</i>	100 %	4.440.381.767,00	-75.570.579,00				3.907.173.233,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	35 Orang/bulan	4.440.381.767,00	-75.570.579,00	Kota Pangkal Pinang,	(PAD) DAU		3.901.173.233,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.00 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	3 Laporan	0,00	0,00	Kota Pangkal Pinang,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.00 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	3 Laporan	0,00	0,00	Kota Pangkal Pinang,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN</i>	100 %	0,00	-48.000.000,00				60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	1 Paket	0,00	-48.000.000,00	Kota Pangkal Pinang,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	4 Orang	0,00	0,00	Kota Pangkal Pinang,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah</i>	100 %	170.982.100,00	10.796.300,00				78.954.668,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	2.853.100,00	-2.840.500,00	Kota Pangkal Pinang,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	1 Paket	2.080.000,00	0,00	Kota Pangkal Pinang,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4.654.668,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

	2.23.01.2.06.00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	26.964.000,00	-9.066.700,00	Kota Pangkal Pinang,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		00	16.300.000,	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.00 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	1 Paket	9.085.000,00	-7.296.500,00	Kota Pangkal Pinang,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	3.000.000,0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	10 Laporan	130.000.000,00	30.000.000,00	Kota Pangkal Pinang,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		00	50.000.000,	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase pengadaan barang milik perangkat daerah</i>	100 %	0,00	0,00				00	45.000.000,	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07.00 05	Pengadaan Mebel										
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	1 Unit	0,00	0,00	Kota Pangkal Pinang,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07.00 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	1 Unit	0,00	0,00	Kota Pangkal Pinang,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			45.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100 %	477.667.460,00	-233.603.540,00					395.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	4 Laporan	192.000.000,00	800.000,00	Kota Pangkal Pinang,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		130.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	4 Laporan	37.750.000,00	5.000.000,00	Kota Pangkal Pinang,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	4 Laporan	247.917.460,00	-239.403.540,00	Kota Pangkal Pinang,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		240.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik</i>	100 %	148.468.392,00	27.013.392,00				130.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>	1 Unit	61.496.696,00	21.931.696,00	Kota Pangkal Pinang,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		43.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	8 Unit	65.700.000,00	-16.190.000,00	Kota Pangkal Pinang,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		55.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	1 Unit	21.271.696,00	21.271.696,00	Kota Pangkal Pinang,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		32.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

2,	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase pustakawan/pengelola perpustakaan yang bersertifikat Persentase koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah dan perpustakaan binaan lainnya	3 6 % %	801.946.568,00	106.000.000,00				256.000.000,00	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP)	23 Perpustakaan	294.473.568,00	198.756.568,00				236.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.00 04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan									
			Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	60 Perpustakaan	97.381.696,00	97.381.696,00	Kota Pangkal Pinang,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.00 12	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota									
			Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi	4 Layanan	172.820.176,00	137.103.176,00	Kota Pangkal Pinang,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		154.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.00 16	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2 Orang	0,00	0,00	Kota Pangkal Pinang,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan									
			<i>Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan</i>	2000 Eksemplar	24.271.696,00	-35.728.304,00	Kota Pangkal Pinang,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		52.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>persentase perpustakaan yang berbasis inklusi sosial</i>	29 %	507.473.000,00	453.190.000,00				20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial									
			<i>Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan</i>	2 Perpustakaan	507.473.000,00	453.190.000,00	Kota Pangkal Pinang,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			283.879.088,00	-11.170.812,00				130.000.000,00	
1,	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase OPD yang memperoleh nilai pengawasan arsip "baik" Persentase Arsiparis yang bersertifikat Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	100 53 93 % % %	263.007.088,00	-123.277.900,00				120.000.000,00	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	<i>berkas arsip dinamis daerah Kabupaten/Kota</i>	2000 berkas	120.752.088,00	24.074.188,00				105.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis									
			<i>Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan</i>	1360 Berkas	0,00	-25.175.000,00	Kota Pangkal Pinang,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

2.24.02.2.01.00 02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis										
			<i>Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan</i>	1500 Berkas	50.098.696,00	7.395.796,00	Kota Pangkal Pinang,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		45.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24.02.2.01.00 03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota										
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	4 Laporan	70.653.392,00	41.853.392,00	Kota Pangkal Pinang,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		55.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota		<i>objek Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota</i>	4 objek	14.170.000,00	-30.605.000,00				5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24.02.2.02.00 04	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis										
			<i>Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis</i>	52 Arsip	14.170.000,00	-30.605.000,00	Kota Pangkal Pinang,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota		<i>jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota</i>	34 Perangkat Daerah	128.085.000,00	26.260.000,00				10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24.02.2.03.00 01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN										
			<i>Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN</i>	30 Pengguna	54.000.000,00	-3.500.000,00	Kota Pangkal Pinang,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24.02.2.03.00 02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota										

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

			<i>Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota</i>	1 Laporan	74.085.000,00	29.760.000,00	Kota Pangkal Pinang,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2,	2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase berkas arsip yang dilindungi dan diselamatkan sesuai dengan ketentuan	80 %	20.872.000,00	-41.772.000,00				10.000.000,00	
	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	<i>jumlah arsip yang dimusnahkan Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun</i>	400 berkas	1.472.000,00	-300.000,00				5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.01.004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun									
			<i>Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun</i>	600 Arsip	1.472.000,00	-300.000,00	Kota Pangkal Pinang,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.05	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	<i>jumlah objek Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang</i>	4 objek	19.400.000,00	-30.600.000,00				5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.05.001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang									
			<i>Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan</i>	25 Arsip	19.400.000,00	-30.600.000,00	Kota Pangkal Pinang,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	J U M L A H				6.323.325.375,00	196.363.127.421,82				5.008.127.901,00	

**BAB IV
PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pangkalpinang Tahun 2025 melalui beberapa tahap mulai dari perencanaan, pengajuan usulan program, perumusan, penyusunan, verifikasi sampai dengan pengesahan dan penetapannya. Dalam proses ini terdapat banyak kekurangan yang masih harus diperbaiki guna menuju kesempurnaan agar diperoleh kesesuaian dan keterkaitan dengan dokumen perencanaan daerah lainnya baik secara top down maupun bottom up.

Rumusan rencana program dan kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja ini dapat menjadi acuan bagi Tim Forum Musrenbang dalam menyusun Perubahan RKPD Tahun 2025 dan menjadi pedoman unit kerja pelaksana lingkup Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pangkalpinang dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Belanja baik itu belanja operasi maupun belanja modal tahun anggaran 2025.

Dengan dukungan dan kerja sama semua pihak, kami harapkan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam pelaksanaan penyelenggaraan program pembangunan dan pemerintahan.

**Pangkalpinang, 14 Mei 2025
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN KOTA PANGKALPINANG,**



**Dr. Hj. ETI FAHRIATY, S.Pd.I., M.Pd
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP 19650724 198703 2 002**

